# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Bandung

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

### 4.1.1 Sejarah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten bandung hingga tahun 1681.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daearh Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang

untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang). Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Pembentukan dan susunan organisasai dinas daerah kota bandung telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota bandung nomor 13 tahun 2007. Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang – undangan untuk menindak lanjuti pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah kota bandung, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi dinas daerah kota bandung.

Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bandung (lembaran negara repoblik indonesia nomor 82 tahun 2007). Yang mengatur tentang pemekaran dan pembentukan wilayah kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintahan kota bandung diatur oleh peraturan pemerintah daerah kota bandung yang telah diubah denga peraturan daerah kota bandung nomor 06 tahun 2008. Dan dalam peraturan menrti dalam negri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Adapun Visi dan Misi dari dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintahan kota bandung adalah

1. Visi

"Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat ( Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat )."

2. Misi

a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

b. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

c. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

d. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .

e. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

f. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

### 4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pemerintahan kota bandung Dinas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada kota bandung terdiri dari :

a. Staf Ahli
b. 17 Dinas Pemerintahan Kota.
c. Kecematan Dan Kelurahan.
d. Sekretariat Daerah.
e. DPRD
f. Perusahaan Daerah.
g. Lembaga Teknis Daerah.

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah kota bandung, dengan peraturan daerah ini dibentuk dinas daerah kota bandung sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari :

a. Dinas pendidikan.
b. Dinas kesehatan.
c. Dinas sosial.
d. Dinas tenaga kerja.
e. Dinas perhubungan.

f. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

g. Dinas kebudayaan dan pariwisata.

h. Dinas tata ruang dan cipta karya.

i. Dinas bina marga dan pengairan.

j. Dinas pemakaman dan pertamanan.

k. Dinas kebekaran,

l. Dinas koperasi, UKM perindustrian dan perdagangan.

m. Dinas pertanian dan ketahanan pangan.

n. Dinas pendapatan.

o. Dinas komunikasi dan informatika.

p. Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah

q. Dinas pemuda dan olah raga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 sekretariat daerah terdiri daeri beberapa bagian dalam pemerintahan kota bandung yaitu :

a. Asisten pemerintah daerah.

b. Asisten ekbang dan kestra.

c. Asisten admistrasi umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari :

a. Sekretariat dewan perwakilan yang rakyat (DPRD) meliputi :

    1. Bagian hukum dan persidangan.

    2. Bagian umum, dan

    3. Bagian keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 perusahaan daerah terdiri dari beberapa perusahaan yaitu :

a. PD. BPR.
b. PDAM
c. PD.Kebersihan.
d. PD. Pasar Bermatabat.
e. Rumah sakit umum daerah kota bandung.
f. Rumah sakit khusus ibu dan anak.
g. Rumah sakit khusus gigi dan mulut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 lembaga teknis daerah pemerintahan kota bandung terdiri dari beberapa bagian unit kerja yaitu :

a. Badan perencanaan pembagunan daerah.
b. Badan kepegawaian daerah.
c. Badan kesatuan bangsa perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
d. Badan pengelolaan lingkungan hidup.
e. Badan pemberdayaan perempuan dan KB.
f. Badan pelayanan perizinan terpadu.
g. Kantor perpustakaan dan arsip daerah.

### 4.1.3 Uraian Tugas Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian :

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merusmuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan pada masing – masing dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar.
c. Mebina bawahan dilingkungan dinas dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktifitas kerja.
d. Memantau mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset daya aperatur pengelolaan keuangan daerah.
e. Menyelenggarakan monitoring pembinaan pelaksanaaan penetapan kebijakan pengelolaan dan pengawasan invstasi dan aset daerah.

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok malaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian,

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta pengkoordinasian tugas – tugas bidang maisng – maisng dinas.

3. Sub Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Sub Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris bagian lingkup keuangan dan program melakukan aktifitas pengkoordinasian dan penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (IPPD).
5. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yan menjadi kewenangan di bidang keuangan dan aset lingkup anggaran, serta menyusun rencana program di bidang anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
6. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas yang menjadi kewenagan di bidang keuangan aset lingkup perbendaharaan, serta mengkaji bahan kebijakan teknis dibidang belanja langsung dan tidak langsung serta pembiayaan dan manajemen kas sebagai bahan rumusan kebijakan.

7. Bidang pemberayaan aset mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada di masing – masing SKPD.
8. Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok mengkaji dan mengkoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup akuntansi pendapatan dan pembiayaan, akuntansi belanja serta pencatatan dan pelaporan sebagai bahan rumusan kebijakan.

**4.1.4 Aktivitas Dinas**

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, Kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota berbasiskan potensi daerah daerah.
3. Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.
4. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota .
6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kota .

## 4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah sebanyak 34 responden dari karyawan – karyawati Dinas SKPD kota Bandung dari bagian Anggaran, dan pengawasan & Umum. Data mengenai karakteristik responden adalah sebagai berikut :

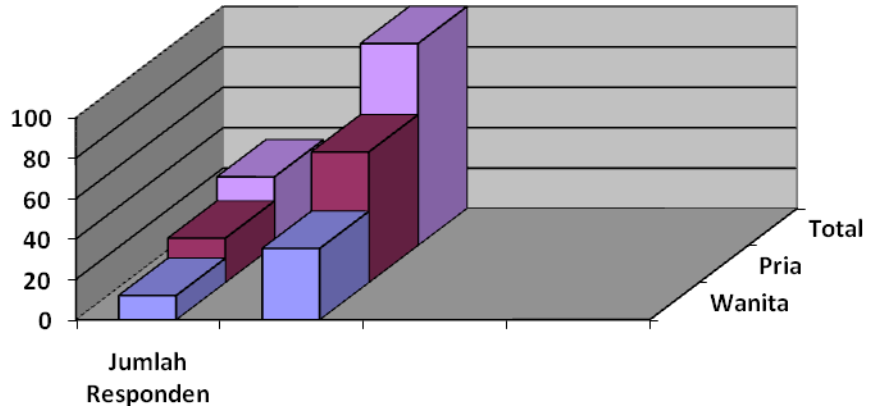
### a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**
**Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**
**Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase % |
|---|---|---|---|
| 1 | Wanita | 12 | 35,3% |
| 2 | Pria | 22 | 64,7% |
| | Jumlah | **34** | **100%** |

Sumber: Data primer yang telah diolah,2012




**Gambar 4.1**
**Grafik Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin wanita sebanyak 35,3%, dan responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 64,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian

ini penelitian ini berjenis kelamin pria. Hal ini disebabkan, kuesioner yang dibagikan kepada Dinas Pemerintahan Kota Bandung lebih banyak responden pria karena pria lebih tegas dan lebih siap untuk berargumentasi dan pada kenyataannya pegawai pria lebih banyak daripada pegawai wanita pada Dinas Pemerintahan Kota Bandung.

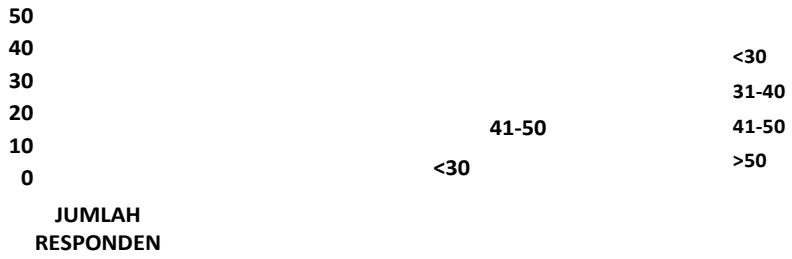
**b. Profil Responden Berdasarkan Usia**

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**
**Profil Responden Berdasarkan Usia**
**Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung**

| Usia | Jumlah Responden | Persentase % |
|---|---|---|
| <30 Tahun | 2 | 5,88% |
| 31-40Tahun | 17 | 50% |
| 41-50Tahun | 7 | 20,58% |
| >50Tahun | 8 | 23,52% |
| Jumlah | **34** | **100 %** |

Sumber: Data primer yang telah diolah,2012




**Gambar 4.2**
**Grafik Profil Responden Berdasarkan Usia**

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara kurang dari 30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 5,88%%, 31 - 40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 50%%, 41-50 tahun berjumlah 7 orang atau

sebesar 20,58%, dan yang lebih dari 40 tahun berjumlah 8orang atau sebesar 23,52%%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40% tahun.

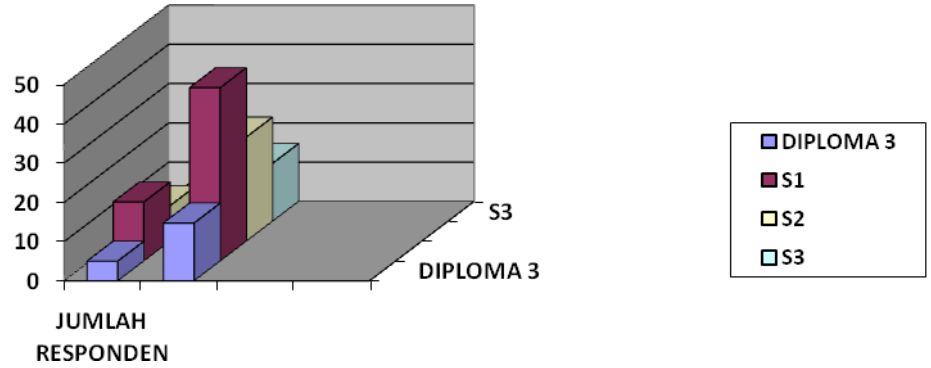
**c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3**
**Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**
**Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung**

| Pendidikan | Jumlah Responden | Persentase % |
|---|---|---|
| Diploma 3 | 5 | 14,70% |
| S1 | 15 | 44,11% |
| S2 | 9 | 26,47% |
| S3 | 5 | 14,70% |
| Jumlah | **34** | **100%** |

Sumber: Data primer yang telah diolah,2012




**Gambar 4.3**
**Grafik Profil Responden Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3) sebanyak 5 orang atau sebesar 14,70%, responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 15 orang atau sebesar 44,11% dan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 9 orang atau sebesar 26,47%, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang atau sebesar 14,70%

responden dengan pendidikan akhir S3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini berarti Kepala Dinas beserta staf nya pada dinas SKPD di Pemerintahan Kota Bandung merupakan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan tinggi seiring dengan tuntutan profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Disamping itu tidak sedikit pula terdapat responden dalam penelitian ini sedang dalam menyelesaikan tingkat pendidikan S2.

## 4.3 Analisis Deskriptif

### 4.3.1 Analisis Deskriptif Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran pada Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Partisipasi penyusunan anggaran diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang partisipasi penyusunan anggaran pada Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**1. Top Down Budgeting**

Indikator *top down budgeting* dalam penyusunan anggaran pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator *top down budgeting*.

**Tabel 4.4**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Top Down Budgeting**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Dalam penyusunan anggaran di dinas SKPD, ditentukan oleh manajemen puncak dan tidak ada konsultasi dengan pihak lain | F | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 59 |
| | % | 67,65 | 5,88 | 14,71 | 8,82 | 2,94 | 34,71 |
| Penyusunan anggaran selama ini mengakomodir masukan dari berbagai pihak | F | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 139 |
| | % | 2,94 | 5,88 | 14,71 | 32,35 | 44,12 | 81,76 |
| Penyusunan anggaran pada Dinas SKPD bawahan dan atasan harus saling komunikasi agar anggaran yang disusun sesuai dengan tujuan dan tercapai secara efektif | F | 0 | 1 | 1 | 7 | 25 | 158 |
| | % | 0 | 2,94 | 2,94 | 20,59 | 73,53 | 92,94 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa indikator *top down budgeting secarah keseluruhan* sudah dilakukan dengan baik. Dikaranakan mayorotas reponden menyatakans setuju. Namun masih ada pertanyaan dalam indikator yang dalam kategori dalam kriteria rendah yaitu Dalam penyusunan anggaran di dinas SKPD, ditentukan oleh manajemen puncak dan tidak ada konsultasi dengan pihak lain masih kurang, hal ini terlihat dari skor jawaban responden sebesar 59 (34,71%). Dikarenakan belum terlaksananya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam penyusunan anggaran.

### *2. Butten Up Budgeting*

Indikator *butten up budgeting* dalam penyusunan anggaran pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator *butten up budgeting*.

**Tabel 4.5**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
***butten up budgeting***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Prosedur penyusunan anggaran dibuat oleh pelaksana anggaran, dan kemudian memperoleh persetujuan dari pmimpin | F | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 144 |
| | % | 0 | 5,88 | 14,71 | 29,41 | 50 | 84,71 |
| Penyusunan anggaran pada dinas SKPD belum semua tim anggaran yang ikut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran | F | 8 | 11 | 8 | 4 | 3 | 85 |
| | % | 23,53 | 32,35 | 23,53 | 11,76 | 8,82 | 50 |
| Prosedur penyusunan anggaran disiapkan oleh tim penganggaran, kemudian diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan | F | 0 | 4 | 5 | 10 | 15 | 138 |
| | % | 0 | 11,76 | 14,71 | 29,41 | 44,12 | 81,18 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa indikator *butten up budgeting* sudah dilakukan dengan baik. Dikaranakan mayorotas reponden menyatakans setuju. Tetapi masih ada pertanyaan dalam indikator yang termasuk dalam skor kategori terendah 85 (50%) yang terdapat pada indikatorpenyusunan anggaran pada dinas SKPD belum semua tim anggaran yang ikut berpatisipasi dalam penyusunan anggaran. Jadi dalam penyusunan anggaran dalam dinas SKPD diharapkan semua tim penyusunan anggaran ikut berpatisipasi dlaam penyusunan anggaran.

### *3. Paticipatif Budgeting*

Indikator *participatif budgeting* dalam penyusunan anggaran pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator *participatif budgeting*.

**Tabel 4.6**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
***Participatif budgeting***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Pendekatan penganggaran melibatkan selama ini sudah melibatkan semua menejer yang terlibat | F | 0 | 2 | 2 | 20 | 10 | 140 |
| | % | 0 | 5,88 | 5,88 | 58,82 | 29,41 | 82,35 |
| Partisipasi penyusunan anggaran dibuat dengan kerja sama dan pasrtisipasi dari manajer pada semua tinggkatan | F | 0 | 3 | 1 | 20 | 10 | 139 |
| | % | 0 | 8,82 | 2,94 | 58,82 | 29,41 | 81,76 |
| Pelaksanaan penyusunan anggaran berorientasi kepada kinerja, sehingga pengalokasian anggaran yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik | F | 1 | 0 | 0 | 13 | 29 | 153 |
| | % | 2,94 | 0 | 0 | 38,24 | 58,82 | 90 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa indikator *partisipatif budgeting* sudah dilakukan dengan sangat baik. Dikaranakan mayorotas reponden menyatakans setuju. Pada item pernyataan pelaksanaan penyusunan anggaran berorientasi kepada kinerja, sehingga pengalokasian anggaran yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan kepada public mempunyai skor tertinggi sebesar 153 (90%) dan skor terendah 139 (81,76%) pada pernyataan partisipasi penyusunan anggaran dibuat dengan kerja sama dan pasrtisipasi dari manajer pada semua tinggkatan.

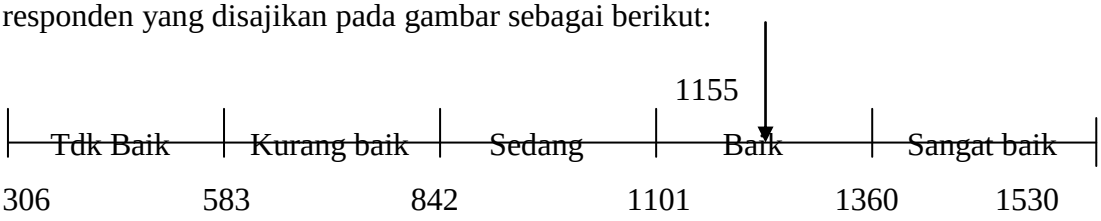
Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai**
**Partisipasi Penyusunan Anggaran**

| Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor Aktual |
|---|---|---|---|
| Top down budgeting | 356 | 510 | 69,80 |
| Butten up budgeting | 367 | 510 | 71,96 |
| Participatif budgeting | 432 | 510 | 69,80 |
| **Total** | **1155** | **1530** | **75,49** |

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.7 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 1155 berada di antara interval 1101 – 1360. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kota Bandung berada dalam kategori baik. Karena mayoritas responden pada variable partisipasi penyusunan anggaran menjawab setuju jadi penyusunan anggaran pada dinas SKPD kota bandung sudah berorientasi terhadap kinerja. Tetapi masih terdapat Skor terendah pada variable Top down budgeting dan Butten up budgeting kerana ada beberapa pertanyaan yang memiliki skor rendah. Karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran seperti dalam jurnalnya Nur faizah Pengaruh partisipasi penyusnan anggaran terhadap knerja manajerian dengan variabel pemoderasi gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dan dlam jurnalnya Jaqueline tangkau Analisis pengaruh komitmen organisional dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dan senjangan anggaran (budgetary slack). Jadi mereka sama – sama mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran.

### 4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel pengawasan intern

Variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada

kuesioner. Pengawasan intern diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 12 butir pernyataan.

**1. *Control environment***

Indikator ***Control environment*** dalam variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator ***Control environment***.

**Tabel 4.8**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
***Control environment***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Pimpinan secara nyata memberikan paham dan dukungan serta contoh penting kesadaran mutu dalam lingkungan pengendalian | F | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 146 |
| | % | 0 | 0 | 17,65 | 35,29 | 47,06 | 85,88 |
| Inpektorat melakukan aktifitasnya menerapkan prosedur pemeriksaan analisis diseluruh area dalam pemerintahan dinas SKPD untuk melakukan pengujian dan pengevaluasian. | F | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 147 |
| | % | 0 | 2,94 | 11,76 | 35,29 | 50 | 86,47 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa indikator *control environment* sudah dilakukan dengan sangat baik. Karena mayoritas responden pada variable partisipasi penyusunan anggaran menjawab setuju. Namun dapat dilihat dalam pada pernyataan Pimpinan secara nyata memberikan paham dan dukungan serta contoh penting kesadaran mutu dalam lingkungan pengendalian mendapatkan skor terendah 146 (85,88%). Jadi diharapkan pimpinan pada dinas SKPD masih diharapkan memberikan contoh kesadaran dalam melakukan aktivitas dalam kinerja dan inpektorat melakukan pengawasan secara rutin pada dinas SKPD Kota Bandung.

**2. *Risk assessment***

Indikator *risk assessment* dalam variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator ***risk assessment***.

**Tabel 4.9**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
***Risk Assessment***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Dalam penaksiran resiko pemerintah daerah menggunakan mekanisme atau cara memadai untuk mengenali resiko dari faktor baik internal maupun ekternal | F | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 141 |
| | % | 0 | 2,94 | 17,65 | 41,18 | 38,24 | 82,94 |
| Dalam setiap kegiatan pimpinan selalu memberikan pengawasan terhadap resiko yang akan dihadapi, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut dihadapi | F | 0 | 2 | 3 | 20 | 9 | 138 |
| | % | 0 | 5,88 | 8,82 | 58,82 | 26,47 | 81,18 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa indikator *risk assessment* sudah dilakukan dengan baik, dikarenakan mayoritas responden pada pertanyaan rata – rata menjawab setuju. Tetapi masih ada pertanyaan yang memiliki skor terendah hal ini terlihat dari jawaban responden. pada pernyataan dalam setiap kegiatan pimpinan selalu memberikan pengawasan terhadap resiko yang akan dihadapi, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut dihadapi mendapat skor terendah 138 (81,18%). Jadi diharapkan pimpinan pada dinas SKPD Bandung memberikan evaluasi dalam setiap kinerja para pegawai nya, agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai untuk mengindari resiko yang akan terjadi.

**3. *Control activities***

Indikator control acitivites dalam variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi

tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator ***control activities***.

**Tabel 4.10**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
***Control Activities***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Skor** |
| Aktifitas pengendalian ditunjukan untuk mendorong kehandalan serta kinerja dan efektifitas unit kerja pemerintahan | F | 1 | 2 | 6 | 13 | 12 | 135 |
| | % | 2,94 | 5,88 | 17,65 | 38,24 | 35,29 | 79,41 |
| Pimpinan pemerintah daerah dalam pembinaan kegiatan/kinerja para pegawai dengan membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program kesejahteraan, pemisahan tugas, ketentuan disiplin, sistem kinerja serta pengembangan karir. Information and comunication / informasi dan komunikasi | F | 0 | 1 | 6 | 13 | 14 | 142 |
| | % | 0 | 2,94 | 17,65 | 38,24 | 41,18 | 83,53 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa indikator *control acitivities* sudah dilakukan dengan baik. Karena jawaban responden mayoritas menjawab setuju. Tetapi masih ada jawaban responden yang menjawab tidak setuju, hal ini terlihat dari jawaban responden pada pernyataan aktifitas pengendalian ditunjukan untuk mendorong kehandalan serta kinerja dan efektifitas unit kerja pemerintahan dengan skor terendah 135 (79,41%). Diharapkan kinerja pemeintah daerah lebih ditingkatkan lagi agar efektifitas kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi.

**4. *Information and comunication* / informasi dan komunikasi**

Indikator *Information and comunication*/informasi dan komunikasi dalam variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator *Information and comunication*/informasi dan komunikasi.

**Tabel 4.11**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**

***Information and comunication* / informasi dan komunikasi**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang dimiliki pemerintah daerah memadai untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu | F | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 147 |
| | % | 0 | 0 | 14,71 | 38,24 | 47,06 | 86,47 |
| Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang dimiliki pemerintah daerah dikelola, dikembangkan dan diperbaharui secara terus menerus | F | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | 139 |
| | % | 0 | 0 | 26,47 | 38,24 | 35,29 | 81,76 |
| Semua pegawai pemerintah daerah selalu membahas dan menyampaikan semua hal – hal yang berhubungan dengan dengan kebijakan pimpinan kepada seluruh anggota organisasi | F | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 130 |
| | % | 0 | 2,94 | 38,24 | 32,35 | 26,47 | 76,47 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa indikator *information and communication* sudah dilakukan dengan baik. Karena rata – rata mayoritas responden menjawa setuju, tetapi masih ada pertanyaan termasuk dalam kategoro skor terendah, ini terlihat dari jawaban responden. Pada pernyataan semua pegawai pemerintah daerah selalu membahas dan menyampaikan semua hal – hal yang berhubungan dengan dengan kebijakan pimpinan kepada seluruh anggota organisasi dengan jawaban persentase skor terendah 130 (76,47%). Dengan ini diharapkan semua pegawai Dinas SKPD Kota Bandung harus saling berkomunikasi dengan baik untuk menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

**5. *Monitoring***

Indikator *monitoring* dalam variabel pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator *monitoring*.

**Tabel 4.12**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**

***Monitoring***

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan rekonsiliasi dan tindakan yang terkait dalam pelaksanaan tugas | F | 0 | 0 | 6 | 13 | 15 | 145 |
| | % | 0 | 0 | 17,65 | 38,24 | 44,12 | 85,29 |
| Pemerintah daerah dalam penetapan tujuan kegiatan instansi terkait mendasarkan pada tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah | F | 0 | 0 | 4 | 18 | 12 | 144 |
| | % | 0 | 0 | 11,76 | 52,94 | 35,29 | 84,71 |
| BPKP melakukan evaluasi dan pengawasan pada dinas SKPD secara terpisah berdasarkan jenjang hirarki dan jabatan masing – masing atasan | F | 0 | 1 | 7 | 12 | 14 | 141 |
| | % | 0 | 2,94 | 20,59 | 35,29 | 41,18 | 82,94 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa indikator *information and communication* sudah dilakukan dengan baik, dikarenakan mayoritas resonden menjawab setuju. Tetapi masih terdapat jawaban responden dengan skor terendah. Dapat dilihat pada pernyataan BPKP melakukan evaluasi dan pengawasan pada dinas SKPD secara terpisah berdasarkan jenjang hirarki dan jabatan masing – masing atasan mendapat skor terendah 141 (82,94%). Ini diharapkan BPKP dan inpektorat melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan kegiatan instansi terkait mendasarkan pada tujuan dan rencana strategi instansi pemerintah.

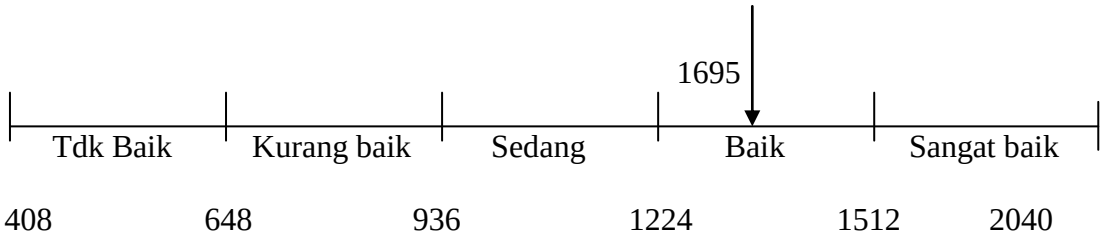
Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang pengawasan iintern pada SKPD Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.13**
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Pengawasan Intern**

| Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor Aktual |
|---|---|---|---|
| Control environment | 293 | 340 | 86.18 |
| Risk assessment | 279 | 340 | 82.06 |
| Control activities | 277 | 340 | 81.47 |
| Information and communication | 416 | 510 | 81.57 |
| Monitoring | 430 | 510 | 84.31 |
| **Total** | **1695** | **2040** | **83,09** |

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.13 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengawasan intern sebesar 1695 berada di antara interval 1224 – 1512. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern pada SKPD Kota Bandung berada dalam kategori baik. Karena mayoritas responden dalam pertanyaan tiap variable rata – rata menjawab setuju. Tetapi masih ada kriteria pertanyaan dalam tiap indikator terdapat skor terendah hal ini dikarenakan masih ada fakor – faktor lain yang mempengaruhi variable pengawasan intern yaitu dalam jurnal nya Abdul rohman, 2009 yaitu Analisis implementasi system akuntansi, penegelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kineja pemerintah daerah dan dalam jurnalnya Wawan sukmana & Lia anggarsari

Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Pemerintah

Variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kinerja pemerintah diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan.

**1. Memperjelas tujuan organisasi**

Indikator memperjelas tujuan organisasi dalam variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator memperjelas tujuan organisasi.

**Tabel 4.14**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Memperjelas tujuan organisasi**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Pegawai pemerintah daerah dalam penilaian kinerja harus mengetahui prosedur, proses dan struktur yang memeberi jaminan agar tercapainya tujuan organisasi | F | 0 | 2 | 1 | 12 | 19 | 150 |
| | % | 0 | 5,88 | 2,94 | 35,29 | 55,88 | 88,24 |
| Dalam merencanakan suatu tujuan terlebih dahulu dikomunikasikan dan dijelaskan ke seluruh bagian organisasi dengan rantai komando yang jelas didasari pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi | F | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 145 |
| | % | 2,94 | 2,94 | 5,88 | 41,18 | 47,06 | 85,29 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa indikator memperjelas tujuan organisasi sudah dilakukan dengan sangat baik. Karena mayoritas responden menjawab setuju “Pegawai pemerintah daerah dalam penilaian kinerja harus mengetahui prosedur, proses dan struktur yang memeberi jaminan agar tercapainya tujuan organisasi“. Tetapi masih terdapat jawaban

respondendalam kategori rendah dapat diliahat pada pernyataan dalam merencanakan suatu tujuan terlebih dahulu dikomunikasikan dan dijelaskan ke seluruh bagian organisasi dengan rantai komando yang jelas didasari pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi mendapat tangapan responden ada pada skor terendah 145 (85,29%).

**2. Mengevaluasi Tugas Akhir**

Indikator mengevaluasi tugas akhir dalam variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator mengevaluasi tugas akhir.

**Tabel 4.15**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Mengevaluasi Tugas Akhir**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Dalam penyempurnaan ukuran kinerja, dilakukan evaluasi target akhir sebagai sarana parbaikan kinerja pemerintah daerah dalam tercapainya tujuan organisasi | F | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 147 |
| | % | 0 | 2,94 | 11,76 | 35,29 | 50 | 86,47 |
| Kepala dinas SKPD selalu melakukan evaluasi target akhir, agar kinerja para pegawai sesuai dengan standar unit kerja yang telah direncanakan | F | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 137 |
| | % | 2,94 | 5,88 | 17,65 | 32,35 | 41,18 | 80,59 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.15 dapat diketahui bahwa indikator mengevaluasi tugas akhir sudah dilakukan dengan baik. Karena rata – rata jawaban responden menjawan setuju. Tetapi masih ada pertanyaan yang mendapatkan skor terendah dapat dilihat pada item pernyataan Kepala dinas SKPD selalu melakukan evaluasi target akhir, agar kinerja para pegawai sesuai dengan standar unit kerja yang telah direncanakan mendapat skor terendah 137 (80,59%). Diharapkan kepala dinas pada dinas SKPD melakukan evalusi akhir

pada setiap kinerja pemerintahan daerah agar tercapainya tujuan organisasi sesuai yang diharapkan.

**3. Menunjukkan Standar Kerja**

Indikator menunjukkan standar kerja dalam variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator menunjukkan standar kerja.

**Tabel 4.16**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Menunjukkan Standar Kerja**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Skor |
| Standar kinerja dalam unit pemerintah daerah memberikan arah unuk target kinerja yang telah di tetapkan | F | 0 | 1 | 9 | 12 | 12 | 137 |
| | % | 0 | 2,94 | 26,47 | 35,29 | 35,29 | 80,59 |
| Masih rendahnya kualitas pembangunan yang dilakukan oleh dinas karena belum sesuai dengan standar kinerja yang telah direncanakan. | F | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 94 |
| | % | 11,76 | 35,29 | 26,47 | 17,65 | 8,82 | 55,29 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.16 dapat diketahui bahwa indikator menunjukkan standar kerja sudah dilakukan dengan baik. Dikarenakan mayoritas responden rata – rata menjawab setuju pada pertanyaan “Standar kinerja dalam unit pemerintah daerah memberikan arah unuk target kinerja yang telah di tetapkan”. Namun masih ada item pertanyaan yang kurang baik yaitu masih rendahnya kualitas pembangunan yang dilakukan oleh dinas karena belum sesuai dengan standar kinerja yang telah direncanakan dengan skor 94 (55,29%). Diharapkan

**4. Menunjukkan Efektivitas**

Indikator menunjukkan efektivitas dalam variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi

tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator menunjukkan efektivitas.

**Tabel 4.17**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Menunjukkan Efektivitas**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Kualitas pembangunan yang dilakuakan oleh dinas cendrung rendah dan masih memiliki kelemahan perencanaan dalam penetapkan target – target capaian kinerja | F | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 74 |
| | % | 26,47 | 41,18 | 23,53 | 5,88 | 2,94 | 43,53 |
| Pembangunan dan pemeliharaan yang telah dilakukan hanya mampu bertahan kurang dari satu tahun | F | 6 | 16 | 10 | 2 | 0 | 76 |
| | % | 17,65 | 47,06 | 29,41 | 5,88 | | 44,71 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.17 dapat diketahui bahwa indikator menunjukkan efektivitas belum dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari jawaban responden. Pada item pernyataan pembangunan dan pemeliharaan yang telah dilakukan hanya mampu bertahan kurang dari satu tahun mempunyai skor tertinggi sebesar 76 (44,71%) dan skor terendah 74 (43,53%) pada pernyataan kualitas pembangunan yang dilakuakan oleh dinas cendrung rendah dan masih memiliki kelemahan perencanaan dalam penetapkan target – target capaian kinerja.

**5. Menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran**

Indikator menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran dalam variabel kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran.

**Tabel 4.18**
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator**
**Menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran**

| Pernyataan | | Skor Jawaban | | | | | % Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Tidak semua pembangunan yang telah dilakukan secara efesien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan. | F | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 91 |
| | % | 2,94 | 44,12 | 38,24 | 11,76 | 2,94 | 53,53 |
| Banyak program yang dilakukan secara efektif dalam mencapai tujuan namun dicapai dengan cara yang tidak ekonomis | F | 10 | 7 | 14 | 3 | 0 | 78 |
| | % | 29,41 | 20,59 | 41,18 | 8,82 | 0 | 45,88 |

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa indikator menentukan aktifitas yang memiliki efektifitas biaya yang paling baik untuk mencapai sasaran kurang dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari jawaban responden. Pada item pernyataan tidak semua pembangunan yang telah dilakukan secara efesien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan mempunyai skor tertinggi sebesar 91 (53,53%) dan skor terendah 78 (45,88%) pada pernyataan banyak program yang dilakukan secara efektif dalam mencapai tujuan namun dicapai dengan cara yang tidak ekonomis.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

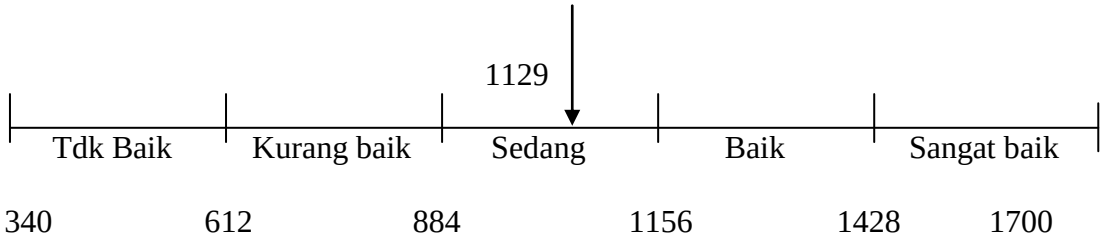
**Tabel 4.19**
**Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kinerja Pemerintah**

| Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor Aktual |
|---|---|---|---|
| Memperjelas tujuan organisasi | 295 | 340 | 86.76 |
| Mengevaluasi target akhir | 284 | 340 | 83.53 |
| Menunjukkan standar kerja | 231 | 340 | 67.94 |
| Menunjukkan efektivitas | 150 | 340 | 44.12 |
| Menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk | 169 | 340 | 49.71 |

| Indikator | Skor Aktual | Skor Ideal | % Skor Aktual |
|---|---|---|---|
| mencapai sasaran | | | |
| **Total** | 1129 | 1700 | 66.41 |

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.19 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:




Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kinerja pemerintah sebesar 1129 berada di antara interval 884 – 1156. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah pada SKPD Kota Bandung berada dalam kategori sedang. Diharapkan kinerja pemerintah daerah pada kota bandung lebih ditingkatkan karena masih ada pembangunan yang belum terlaksana dikarenakan masih rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-target capaian kinerja

## 4.4 Analisisi Verifikatif

### 4.4.1 Ketarkaitan Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan

Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas SKPD Pada Kota Bandung.

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2}$$

Dimana:

Y = variabel tak bebas (Kinerja pemeintah Daerah)

a = bilangan berkonstanta

$b_1$,$b_2$ = koefisien arah garis

$X_1$ = variabel bebas $X_1$(Penyusunan Anggaran)

$X_2$ = variabel bebas $X_2$ (Pengawasan Intern)

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.20**
**Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients** [a]

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 7.320 | 4.996 | | 1.465 | .153 | | |
| | x1 | .424 | .205 | .366 | 2.066 | .047 | .556 | 1.799 |
| | x2 | .244 | .115 | .376 | 2.119 | .042 | .556 | 1.799 |

a. Dependent Variable: y

**Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012**

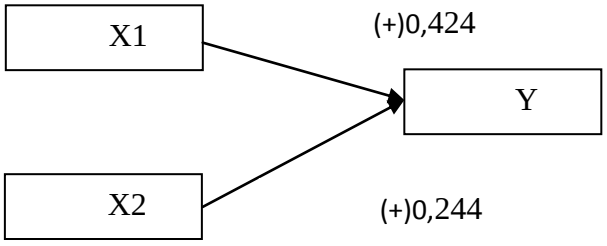
Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar 7.32. Nilai koefisien arah garis ($b_1$) untuk $X_1$ sebesar 0,424 dan nilai koefisien arah garis ($b_2$) untuk $X_2$ sebesar 0,244 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: $Y = 7.320 + 0{,}424X_1 + 0{,}244\ X_2$

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 7.320, artinya jika partisipasi penyusunan anggaran ($X_1$) dan pengawasan intern ($X_2$) nilainya adalah 0, maka kinerja pemerintah berarti tetap sebesar 7.320.

Koefisien regresi variabel partisipasi penyusunan anggaran ($X_1$) sebesar 0,424 artinya jika variabel pengawasan intern nilainya tetap dan partisipasi penyusunan anggaran mengalami perubahan sebesar 1 maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,320 + 0,424 (1) + 0,244 (0) = 7,744. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin meningkat partisipasi penyusunan anggaran maka semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Koefisien regresi variabel pengawasan intern ($X_2$) sebesar 0,244, artinya jika variabel partisipasi penyusunan anggaran nilainya 0 dan pengawasan intern mengalami perubahan sebesar 1 maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,320 + 0,424 (0) + 0,244 (1) = 7,564. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pengawasan intern dengan kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin baik pengawasan intern maka kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.

Maka paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma ganda hubungan dua variabel bebas berpengaruh positif dengan satu variabel tergantung yang memiliki pola hubungan variabel sebagai berikut:




**Gambar 4.3**

**Model analisis regresi berganda**

Keterangan

X1 = Partisipasi Penyusunan Anggaran

X2 = Pengawasan Intern

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

### 4.4.2 Pengaruh Partisipasi penyusunan Anggaran (x1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Untuk melihat lebih rinci pengaruh partisipasi penyusunan anggaran($X_{1)}$ dengan kinerja pemerintah daerah (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.25**
**Korelasi Antara Partisipasi PenyusunanAnggaran (X1) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

**Correlations**

| Control Variables | | | Partisipasi penyusunan Anggaran | Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| Pengawasan | Partisipasi Penyusunan Anggaran | Correlation | 1,000 | ,616 |
| | | Significance (2-tailed) | . | ,000 |
| | | Df | 0 | 31 |
| | Kinerja | Correlation | ,616 | 1,000 |
| | | Significance (2-tailed) | ,000 | . |
| | | Df | 31 | 0 |

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi partisipasi penyusunan anggaran ($X_1$) terhadap kinerja pemerintah daerah (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintah r = 0,616, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja pemerintha. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2004: 216) maka eratnya korelasi partisipasi penyusunan anggaran dengan

kinerja pemerintah adalah cukup kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila partisipasi penyusunan anggaran meningkat maka kinerja pemerintah juga akan meningkat. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar (0,616 X 0,616 X 100% = 37,95%). Ini artinya partisipasi penyusunan angaran memberikan pengaruh sebesar 37,95% terhadap kienerja pemerintah daerah. Dikarenakan masih ada faktor – faktor lain yang mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran seperti dalam jurnalnya Nur faizah Pengaruh partisipasi penyusnan anggaran terhadap knerja manajerial dengan variabel pemoderasi gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dan dalam jurnalnya Jaqueline tangkau Analisis pengaruh komitmen organisional dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dan senjangan anggaran (budgetary slack). Jadi faktor lain pemoderasi gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi dan komitmen organisional, senjangan anggaran sama – sama mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran.

Dugaan sementara partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$Ho_4.\rho = 0$: Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada dinas SKPD Kota Bandung

$Ha_4.\rho \neq 0$: Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada dinas SKPD Kota Bandung

### 4.4.3 Pengaruh Pengewasan intern (X2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Untuk melihat lebih rinci pengaruh Pengawasan Intern ($X_2$) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.26**
**Korelasi Antara Pengawasan intern (X2) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)**

**Correlations**

| Control Variables | | | Pengawasan intern | Kinerja |
|---|---|---|---|---|
| Partisipasi | Pengawasan Intern | Correlation | 1,000 | ,620 |
| | | Significance (2-tailed) | . | ,000 |
| | | Df | 0 | 31 |
| | Kinerja | Correlation | ,620 | 1,000 |
| | | Significance (2-tailed) | ,000 | . |
| | | Df | 31 | 0 |

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi X2 terhadap Y sebagai berikut: koefisien korelasi antara pengawasan intern dengan kinerja pemerintah r = 0,620, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara pengawasan intern dengan kinerja pemerintah. Jika diinterpretasikan menurut Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi pengawasan intern dengan kinerja pemerintah adalah kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila pengawasan intern meningkat maka kinerja pemerintah akan meningkat. Pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah adalah sebesar (0,620 X 0,620 X 100% = 39,44%). Ini artinya pengawsaan intern memberikan pengaruh sebesar 39,44% terhadap kienerja pemerintah daerah. Karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi variable pengawasan intern yaitu dalam jurnal nya Abdul rohman, 2009 yaitu Analisis implementasi system akuntansi, penegelolaan

keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan dan kineja pemerintah daerah dan dalam jurnalnya Wawan sukmana & Lia anggarsari Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga dalam jurnalnya Askam Tuasikal yaitu Pengaruh pengawasan, pemahaman, system akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap unit satuan kerja pemerintah. Jadi implementasi system akuntansi, penegelolaan keuangan daerah, pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah serta system akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan sama – sama mempengaruhi variabel pengawasan intern.

Dugaan sementara pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$Ho_4.\rho = 0$: Pengawasan Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada dinas SKPD Kota Bandung.

$Ha_4.\rho \neq 0$: Pengawasan Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada dinas SKPD Kota Bandung.